

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Resources-Based Theory*

Resources-based theory yang dipelopori oleh Penrose (1959) mengemukakan bahwa sumber daya milik perusahaan sifatnya heterogen dan memiliki karakter yang khusus dan unik. Resource based theory membahas bagaimana perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan mengembangkan dan menganalisis sumber daya yang dimilikinya. Peteraf dan Bergen dalam Radjenovic dan Krstic (2017:18) menyatakan bahwa asumsi utama dari pendekatan berbasis sumber daya (*resources-based*) adalah bahwa kemampuan kompetitif perusahaan tergantung pada sumber daya dan kapabilitasnya. Dalam perkembangannya, *resources-based theory* berfokus pada pembuktian hubungan antara sumber daya dan daya saing perusahaan, serta dampak dari hubungan tersebut terhadap keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan peningkatan kinerja perusahaan.

Susanto dalam Juwita dan Angela (2016:3) menjelaskan bahwa organisasi membutuhkan dua hal utama agar dapat bersaing. Pertama adalah keunggulan dalam sumber daya, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*). Hal kedua yang harus dimiliki perusahaan adalah kemampuan untuk mengelola sumber daya tersebut secara efektif. Kombinasi dari kedua hal ini akan menciptakan keunggulan kompetitif yang khas untuk perusahaan

Terkait dengan *intellectual capital* dan *corporate governance*, Pulic (1998) dalam Susanti (2016:149) menjelaskan bahwa tujuan utama perekonomian yang berbasis pengetahuan adalah menciptakan nilai tambah. Dalam rangka menciptakan nilai tambah, diperlukan suatu ukuran untuk dapat merepresentasikan potensi intelektual dan kemampuan yang melekat pada sumber daya perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan *resources-based theory*, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap kinerja

perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai pasar perusahaan (Penrose:1959).

2.1.2. *Stakeholder Theory*

Freeman dan Reed dalam Ulum (2017: 35) mendefinisikan *stakeholder* sebagai keseluruhan kelompok atau individu yang dapat diidentifikasi, yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder theory* menyatakan bahwa para pemangku kepentingan memiliki hak untuk memperoleh informasi menyeluruh terkait kegiatan dan kondisi perusahaan. Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder (Ulum 2017: 35). Manajemen perusahaan diharapkan untuk melaksanakan aktivitas yang dapat memberi nilai tambah terbesar bagi pemangku kepentingan.

Dalam kaitannya dengan *Intellectual Capital* dan *corporate governance*, *stakeholder theory* dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu etika dan manajerial. Pada etika, Deegan (2004) dalam Ulum (2017 : 36) menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* berhak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus menjalankan organisasi untuk keuntungan seluruh *stakeholder*. Untuk memenuhi aspek etika ini, manajer harus dapat mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada di perusahaan, berupa karyawan (*human capital*), asset fisik (*physical capital*), maupun *structural capital*. Pada manajerial, Watts and Zimmerman (1986) dalam Ulum (2017:36) menyatakan bahwa kekuatan *stakeholder* untuk mempengaruhi manajemen perusahaan harus dipandang sebagai fungsi dari tingkat pengendalian *stakeholder* atas sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Artinya *stakeholder* mempunyai kepentingan memengaruhi manajemen agar memanfaatkan seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki perusahaan secara maksimal. Seperti perspektif etika sebelumnya, pemanfaatan sumber daya yang baik oleh manajemen, termasuk *intellectual capital*, akan menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan seluruh *stakeholder*, sehingga tujuan organisasi tercapai.

2.1.3. *Legitimacy Theory*

Guhtrie dan Parker dalam Ulum (2017:40) menjelaskan organisasi berdasarkan teori legitimasi secara berkelanjutan harus dapat menunjukkan operasi bisnisnya sejalan dan konsisten dengan nilai social. Sejalan dengan itu, Deegan menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan berusaha untuk menjamin operasinya berada dalam batas norma yang berlaku dalam masyarakat (Ulum 2017:39). Menurut Deegan, teori legitimasi berdasar pada premis bahwa ada kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat tempat dimana perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya. Kontrak sosial ini mengimplikasikan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi terhadap perusahaan dan bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya.

Salah satu cara untuk memperoleh pengakuan masyarakat bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan bisnisnya sesuai dengan nilai sosial dan ekspektasi masyarakat adalah dengan pengungkapan dalam laporan perusahaan. Lindbolm (1994) dalam Ulum (2017:40) menyatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan pengungkapan untuk menunjukkan perhatian manajemen terkait nilai sosial, juga untuk mengarahkan kembali fokus masyarakat akan adanya pengaruh negative aktivitas perusahaan. Dengan demikian, pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan didasari oleh persepsi dan pengakuan yang diharapkan oleh perusahaan dari public.

Berkaitan dengan *Intellectual Capital*, teori legitimasi memandang bahwa dalam rangka memperoleh pengakuan dari publik atas kekayaan intelektualnya, perusahaan akan terdorong mengungkapkan kapasitas *intellectual capital*-nya dalam laporan keuangan. Pengakuan legitimasi publik ini menjadi penting bagi perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan sosial perusahaan. (Ulum, 2017:41)

2.1.4. *Teori Keagenan*

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer dalam hal pengelolaan perusahaan, dimana pemilik merupakan suatu entitas yang mendelegasikan wewenang untuk mengelola perusahaan kepada pihak manajemen (*agent*). Perbedaan peran di antara kedua entitas ini mengakibatkan suatu

ketimpangan informasi. Teori keagenan menjelaskan penentuan kontrak yang paling efisien yang bisa membatasi masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976 dan Eisenhardt, 1989) dalam Ujiyanto dan Pramuka (2007)

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menyatakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*)

Berdasarkan pernyataan diatas, diasumsikan bahwa manajer sebagai manusia juga punya sifat mementingkan diri sendiri dan mengesampingkan kepentingan manusia lain. Jika manajemen memiliki sebagian atau seluruh saham perusahaan, akan mempengaruhi bagaimana manajemen menjalankan perusahaan. Manajemen akan lebih termotivasi karena turut memiliki kepentingan dan rasa kepemilikan terhadap perusahaan, artinya kepemilikan manajerial akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Jika perusahaan dimiliki oleh sebuah institusi, maka institusi tersebut akan selalu menghindarkan risiko atas kepentingannya sebagai pemilik perusahaan. Institusi tersebut akan terus memonitor bagaimana manajemen menjalankan perusahaannya. Monitoring dari institusi tersebut akan memaksa manajemen perusahaan untuk bekerja lebih baik. Hal ini pula yang membuat kepemilikan institusional mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya komisaris independen juga dapat menjadi faktor yang memicu kinerja manajemen menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan komisaris independen terus melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang dijalankan manajemen.

Berkaitan dengan *corporate governance*, teori keagenan merupakan dasar konsep *corporate governance* yang sangat berkaitan dalam hal membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yaitu manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan modal yang ditanamkan investor, juga berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007)

2.1.5. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori ini membahas dorongan perusahaan untuk memberikan informasi laporan keuangan tahunan kepada pihak eksternal yang dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi (Ujiyantho dan Pramuka (2007); Brigham dan Houston (2011)). Dorongan tersebut didasari adanya asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Untuk meminimalisir asimetri informasi ini, maka perusahaan perlu mengungkapkan informasi perusahaan, baik dalam konteks keuangan maupun non keuangan. Suatu pengungkapan dikatakan mengandung informasi jika pengungkapan tersebut dapat memicu reaksi pasar, berupa perubahan harga pasar atau *abnormal return*. Jika pengungkapan tersebut memberikan dampak positif berupa kenaikan harga saham, maka pengungkapan tersebut merupakan sinyal positif demikian pula sebaliknya. Seorang manajer memiliki motivasi untuk mengungkapkan *private information* (informasi keuangan dan non keuangan) secara sukarela karena perusahaan berharap informasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif.

Dalam kaitannya dengan *intellectual capital* dan *corporate governance*, pengungkapan dan penerapan *intellectual capital* dan *corporate governance* memungkinkan investor dan *stakeholder* lain untuk lebih baik dalam menilai kemampuan perusahaan di masa depan, melakukan penilaian yang tepat terhadap perusahaan, dan mengurangi persepsi risiko.

2.1.6. Intellectual Capital

2.1.6.1. Definisi

The International Accounting Standards Board (IASB) merujuk asset tak berwujud sebagai *goodwill*, sementara *intellectual capital* sebagai bagian dari *goodwill*. Oleh karena itu, *Intellectual Capital* seringkali didefinisikan sebagai salah satu asset tak berwujud. Definisi Aset Tak Berwujud adalah asset non moneter tanpa wujud fisik. Definisi tersebut diadopsi dari definisi yang dikemukakan oleh IAS 38 tentang *intangible asset* yang kurang lebih sama dengan pengertian yang diajukan dalam FRS 10 tentang *goodwill* dan *intangible asset*. Baik IAS 38 maupun FRS 10, menyatakan bahwa asset tak berwujud harus dapat diidentifikasi, bukan

asset keuangan, juga tidak memiliki substansi fisik. Paragraf 11 dalam PSAK 19 menjelaskan definisi asset tak berwujud mensyaratkan asset tak berwujud tersebut dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan dari *goodwill*. Seiring dengan berjalannya waktu, para peneliti berusaha membedakan asset tak berwujud dan *intellectual capital*.

Briker (dalam Hong, 2007) mendefinisikan *intellectual capital* sebagai kombinasi dari aktiva tidak berwujud yang meningkatkan nilai perusahaan. Stewart (1997) dalam Murti (2010) mendefinisikan *intellectual capital* sebagai:

The sum of everything and everybody in your company knows that gives you a competitive edge in the market place. It is intellectual material-knowledge, information, intellectual property, experience that can be put to use to create wealth.

Dalam kutipan diatas, Stewart menyatakan bahwa *intellectual capital* adalah gabungan dari semua (benda atau orang) yang mampu memberi nilai pasar kompetitif berupa pengetahuan, informasi, properti intelektual, pengalaman yang dapat menciptakan kekayaan bagi perusahaan. Dalam Ulum (2017:79) Brooking mendefinisikan *intellectual capital* sebagai kombinasi *intangible assets* yang dapat membuat perusahaan untuk berfungsi.

Salah satu definisi *intellectual capital* yang banyak digunakan adalah definisi yang diungkapkan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), yang menyatakan bahwa *intellectual capital* adalah nilai ekonomi dari dua kategori asset tak berwujud yaitu (1) *organizational (structural) capital*, yang mengacu pada hal seperti *system software*, jaringan distribusi, dan rantai pasokan, dan (2) *human capital*, meliputi sumber daya manusia dalam organisasi (karyawan), dan sumber daya eksternal yang berkaitan dengan organisasi (pemasok dan konsumen). Sering kali *intellectual capital* dipersamakan dengan asset tak berwujud. Namun definisi yang diungkapkan oleh OECD cukup menjelaskan perbedaan yang ada antara keduanya dengan menyatakan *intellectual capital* sebagai bagian terpisah dari dasar penetapan asset tak berwujud secara keseluruhan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, terdapat komponen-komponen asset tak berwujud yang secara logika tidak membentuk bagian dari *intellectual capital* suatu perusahaan. Salah satu contoh komponen yang tidak termasuk pembentuk bagian

dari *intellectual capital* adalah reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan mungkin merupakan hasil sampingan dari penggunaan *intellectual capital* secara efektif oleh perusahaan, namun bukan bagian dari *intellectual capital* (Ulum, 2009:21)

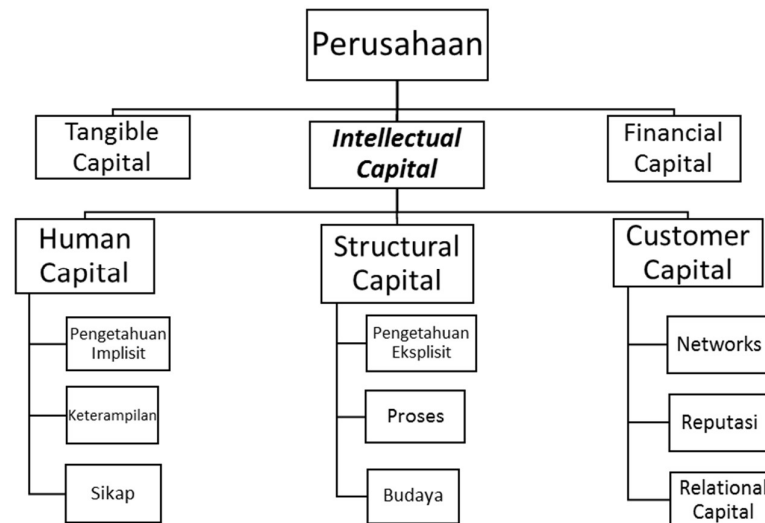
Bontis (2000) mengemukakan bahwa *intellectual capital* terkait dengan berbagai usaha yang telah dilakukan untuk mengestimasi nilai pengetahuan dalam rangka mendapatkan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa peningkatan pengetahuan dan penggunaan pengetahuan tersebut dengan lebih efektif dan efisien dapat menghasilkan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Boeckstein (2006) dalam Ulum (2017:83) mengemukakan bahwa pengetahuan tersebut dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan pelanggan (*customer* atau *relational capital*), pengetahuan yang berhubungan karyawan (*human capital*), dan pengetahuan yang berhubungan hanya dengan perusahaan (*structural capital*). Ketiga kategori inilah yang membentuk suatu *intellectual capital* bagi perusahaan.

2.1.6.2. Komponen Intellectual Capital

Dalam Ulum (2017:83), Edvinsson dan Malone (1997) menjelaskan bahwa nilai *intellectual capital* suatu perusahaan adalah jumlah dari *human capital* dan *structural capital*. Selanjutnya, Brinker (1997) dan Skyrme (2000) memperluas kategori tersebut dengan menambah kategori yang ketiga, yaitu *customer capital*.

International Federation of Accountant (IFAC) mengklasifikasikan *intellectual capital* ke dalam tiga kategori, yaitu *Organisational Capital*, *Relational Capital*, dan *Human Capital*. Sejalan dengan pengklasifikasian IFAC, Bontis (2000) dalam Ulum (2009:30) mengemukakan bahwa secara umum, para peneliti mengidentifikasi tiga komponen utama dari *intellectual capital* adalah *Human Capital* (HC), *Structural Capital* (SC), dan *Customer Capital* (CC). Menurut Bontis, secara sederhana HC menggambarkan *individual knowledge stock* suatu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. HC merupakan kombinasi dari *genetic inheritance, education, experience, and attitude* tentang kehidupan dan bisnis. SC meliputi seluruh *non-human storehouses of knowledge* dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah *database, organizational charts, process manual, strategies, routines*, dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar

daripada nilai materialnya. Sedangkan CC berbicara tentang pengetahuan yang melekat dalam *marketing channels* dan *customer relationship* yang dikembangkan oleh sebuah organisasi melalui jalan bisnisnya.



Gambar 2.1 Komponen *Intellectual Capital*

Sumber : Ulum (2009)

2.6.1.3. Pengukuran Intellectual Capital

Dalam pengukuran *intellectual capital*, terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu metode pengukuran non-moneter dan pengukuran moneter. Hartono (2001) dalam Ulum (2009:31) menjabarkan berbagai kelebihan menggunakan metode pengukuran non-moneter sebagai berikut:

1. Pengukuran non-moneter memudahkan perusahaan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk *intellectual capital*. Hal ini sulit dilakukan jika perusahaan menggunakan pengukuran secara moneter.
2. Pengukuran non-moneter dapat mengukur pengaruh perkembangan internal (*internal development*) dalam pembentukan *intellectual capital*. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran moneter.
3. Biaya-biaya terkait pembentukan *intellectual capital* yang dikapitalisasi menjadi asset dapat meningkatkan kemungkinan manipulasi laba dalam laporan keuangan.

Sawarjuno dan Kadir (2003) dalam Ulum (2009:33) menjelaskan bahwa ada tiga metode yang dapat digunakan dalam bidang akuntansi untuk mengukur dan melaporkan *intellectual capital* perusahaan. Metode tersebut dibagi dalam dua kelompok yaitu pengukuran secara tidak langsung dan pengukuran secara langsung.

1. *Indirect Method* (Pengukuran secara tidak langsung)

a. Return on Asset (ROA)

Metode ini menghitung kelebihan *return* dari asset berwujud milik perusahaan dan menganggapnya sebagai asset tak berwujud untuk dihitung sebagai *intellectual capital* (Ulum, 2009:33). Metode ini mudah dilakukan karena semua informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh pada laporan keuangan. Perusahaan juga dapat melakukan perbandingan pada perusahaan sejenis. Namun metode ini tidak dapat digunakan untuk perusahaan yang baru berdiri sebab pengukuran *intellectual capital* berdasarkan *historical cost*.

b. Market Capitalization Method

Metode ini menyajikan nilai *intellectual capital* dengan menghitung kelebihan nilai kapitalisasi pasar perusahaan yang tercermin dari nilai pasar saham atas ekuitas pemegang saham. Salah satu metode yang sering dipakai adalah Tobin's Q. Namun metode ini juga memiliki kelemahan yaitu, laporan keuangan tidak dipersyaratkan untuk menyesuaikan nilainya dengan inflasi, juga masih terdapat ketergantungan pada pasar yang didasarkan pada asumsi pasar efisien.

2. *Direct Intellectual Capital Method*

Brooking dalam Ulum (2009) mengklasifikasikan *intellectual capital* menjadi empat kategori yaitu :

- a. Market assets (merk, loyalitas konsumen)
- b. Intellectual property assets (paten, rahasia dagang)
- c. Human-centered asset (pendidikan, penguasaan pekerjaan)
- d. Infrastructure assets (filosofi manajemen, budaya perusahaan)

Teknik pengukuran *intellectual capital* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengukuran model Pulic. Beberapa alasan yang mendukung digunakannya VAIC sebagai indikator dari *intellectual capital* (Pulic dan Bornemann, 1999 dalam Firer dan William, 2003) adalah sebagai berikut

1. VAIC menyediakan dasar yang terstandar dan konsisten dalam pengukuran sehingga dapat dibandingkan antar perusahaan sebab menyediakan standar dan konsistensi berdasarkan ukuran kinerja *intellectual capital*.
2. Dalam perhitungan VAIC, data yang digunakan berdasarkan data yang dapat ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit, bersifat objektif dan dapat diandalkan.
3. Pelaksanaan metode ini sederhana dan hasilnya dapat dengan mudah ditafsirkan. Metode ini paling sesuai dengan pemahaman kognitif *stakeholder* internal maupun eksternal.

Langkah awal dari metode VAIC adalah dengan mengidentifikasi kemampuan penciptaan nilai atau *value* perusahaan. *Value added* merupakan selisih dari output (seluruh total penjualan dan pendapatan lain) dan input (beban penjualan dan beban lain tidak termasuk beban karyawan). VAIC terdiri dari rasio-rasio yang menunjukkan hubungan VA dengan komponen lainnya yang akan membentuk *intellectual capital* suatu perusahaan.

1. *Value Added Capital Employed* (VACA)

Capital Employed adalah dana yang tersedia dari ekuitas dan laba bersih. VACA menunjukkan kontribusi dari setiap unit *funds employed* atau *capital employed* terhadap *value added* perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya berupa *capital asset* dengan baik dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Dewi, 2011)

2. *Value Added Human Capital* (VAHU)

VAHU menggambarkan berapa banyak *value added* dapat dihasilkan dari dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja. Hubungan antara *value added* dengan *human capital* mengindikasikan kemampuan *human capital* untuk menciptakan nilai dalam perusahaan.

3. *Structure Capital Value Added* (STVA)

STVA adalah jumlah *structure capital* yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah dari *value added* dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan *structure capital* dalam pencapaian nilai (Ulum dalam Dewi 2011).

2.1.7. Corporate Governance

2.1.7.1 Definisi

The Organisation for Economic Corporation and Development (1999) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

The system by which business corporations are directed and control. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rule and procedure formaking decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.

Menurut Sidharta dan Chyntia (dalam Oktapiyani, 2009) istilah *Good Corporate Governance* banyak diketahui sebagai suatu system dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Sutedi (2011:2) mengungkapkan bahwa pengertian *Good Corporate Governance* adalah sebuah sistem yang dapat mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua *stakeholder*.

Inti dari *corporate governance* yaitu adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, yaitu untuk mengatasi masalah yang timbul akibat hubungan pemilik modal dengan manajer. Pemilik terbatas dalam memastikan bahwa modal yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan. Prinsip *corporate governance* adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, keadilan dan kewajaran.

Berikut adalah penjabaran dari elemen-elemen dalam *corporate governance* yang akan diteliti dalam penelitian ini

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dipegang oleh institusi keuangan, misalnya perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, atau badan usaha local lainnya. Kepemilikan Institusional memiliki kemampuan untuk mengontrol atau memonitoring manajemen agar tidak merugikan pemilik perusahaan. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan, memungkinkan dilakukannya akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Sehingga, tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dianggap menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, menjadikan kepemilikan institusional adalah mekanisme yang handal untuk memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

2. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham oleh pihak yang berasal dari luar negeri baik individu maupun institusional. UU No 25 tahun 2007 pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Menurut Sanghoon (2008) dalam Hermiyetti (2017), kepemilikan asing dan kepemilikan institusional lebih mampu mengendalikan kebijakan manajemen karena memiliki kemampuan yang baik di bidang keuangan dan bisnis. Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing memberikan pengungkapan lebih dengan alasan :

- a. Perusahaan asing memperoleh pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri
- b. Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum
- c. Perusahaan mungkin memiliki system informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan induk.

3. Proporsi Komisaris Independen

Menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab mengawasi kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Fama dan Jensen (1983) dalam Rawi dan Muchlish (2010) menyatakan bahwa komisaris independen dapat berperan sebagai penengah saat adanya perselisihan antara manajer internal sehingga pengawasan kebijakan manajemen dapat dilakukan.

Peraturan Bursa Efek Jakarta tanggal 1 Juli 2000 mewajibkan seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa untuk memiliki jumlah komisaris independen secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Pengukuran komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persentase jumlah komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris.

2.1.8. Kinerja Keuangan Perusahaan (*Financial Performance*)

Kinerja perusahaan dapat didefinisikan sebagai efektivitas operasional perusahaan yang ditetapkan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain untuk menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan, pengukuran kinerja juga dilakukan dalam rangka perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasional sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Munawir (1998) dalam Rahayu (2010) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai prestasi kerja yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari beberapa rasio keuangan, misalnya *return on equity* (ROE), *asset turnover* (ATO), dan *return on asset* (ROA). Rasio

keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA).

Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk rasio provitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan agar menghasilkan keuntungan. Selain mudah dihitung dan menerapkan prinsip transparansi, *Return On Asset* (ROA) juga mampu memberikan gambaran tingkat pengembalian keuntungan yang dapat diperoleh investor atas investasinya. Dengan *Return On Asset* (ROA), investor dapat melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk dapat memaksimalkan laba. Hal ini sejalan dengan tujuan *Good Corporate Governance* untuk menggunakan asset dengan efisien dan optimal (OECD,2004). Semakin tinggi *Return On Asset* (ROA) sebuah perusahaan, maka kinerja keuangan perusahaan dinilai semakin baik.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menguji pengaruh *intellectual capital* dan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Poh,Kilicman, dan Ibrahim (2018) dalam penelitian yang berjudul *On Intellectual Capital and Financial Performances of Banks in Malaysia* dengan menggunakan VAIC Model, penelitian menemukan bahwa efisiensi *intellectual capital* (IC) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Dari laporan keuangan periode 6 tahunan, diketahui bahwa *Capital Employed Efficiency* (CEE) memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return of Asset* (ROA), *Human Capital Efficiency* (HCE) terhadap *Return of Equity* (ROE), dan *Structural Capital Efficiency* (SCE) terhadap *Leverage* (LEV). Pada tahun yang sama, penelitian yang dilakukan oleh Rashid,Niazi, dan Noreen terhadap perusahaan manufaktur di Pakistan/ Laporan Keuangan 16 perusahaan terdaftar di sektor *non financial* periode 2003 – 2016, menyimpulkan bahwa *Intellectual capital* tidak mempengaruhi nilai pasar perusahaan.

Sardo dan Serrasqueiro (2017) melakukan penelitian terhadap 2.090 perusahaan *non financial* yang terdaftar dari 14 negara di Eropa Barat, periode laporan 2004 – 2015 dengan judul *A European empirical study of the relationship*

between firms' intellectual capital, financial performance and market value. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu *intellectual capital* (IC) adalah sumber penting dalam penciptaan nilai perusahaan. *Human Capital Efficiency* (HCE) ditemukan sebagai faktor kunci dalam kesejahteraan perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa *Capital Employed Efficiency* (CEE) berdampak positif atas kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek. *Structural Capital Efficiency* (SCE) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang.

Isola, Odekunle, dan Akanni (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *The Impact of Intellectual Capital on the Performance of Firms in Nigeria* meneliti 97 perusahaan periode 1999-2014. Dalam hasil penelitian ini, ditemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Value Added Intellectual Capital* (VAIC) berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi, setiap komponennya memberikan hasil yang berbeda. *Structural Capital Efficiency* (SCE) dan *Human Capital Efficiency* (HCE) berpengaruh positif sedangkan *Capital Employed Efficiency* (CEE) berpengaruh negatif

Hamdan (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Intellectual Capital and Firm Performance; Differentiating between accounting-based and market-based performance* mengungkapkan bahwa *Accounting-Based Traditional* yang mengukur ROA dapat menangkap hubungan antara IC dan kinerja, namun berkebalikan dengan pengukuran market-based Tobin's Q yang tidak berhubungan dengan *Intellectual Capital*. Suroso, Widyastuti, Salim, dan Setyawati pada tahun 2017 melakukan penelitian pada Laporan keuangan Bank Islam di Indonesia, menggunakan data bulanan periode 2012-2014, total sampel 396, mengungkapkan bahwa ROA dipengaruhi oleh *Human Capital*, *Structure Capital*, *Capital Employee*, *Board of Size*, *Board of Demographic*. Sedangkan *Asset Growth* dipengaruhi oleh *Board of Demographic* dan *Board of Commissioners*. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa *Human Capital* berpengaruh pada ROA tetapi tidak berpengaruh terhadap *Asset Growth*.

Khanna (2016) melakukan penelitian pada laporan tahunan periode 2011 - 2015 dari 32 perusahaan manufaktur yang listed terkait *Corporate Governance* diukur dengan 7 parameter yang disebutkan dalam SEBI. Penelitian menunjukkan bahwa *board composition*, *board ownership or shareholding pattern*, *disclosures*,

and other compliances adalah parameter dalam *corporate governance* yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur.

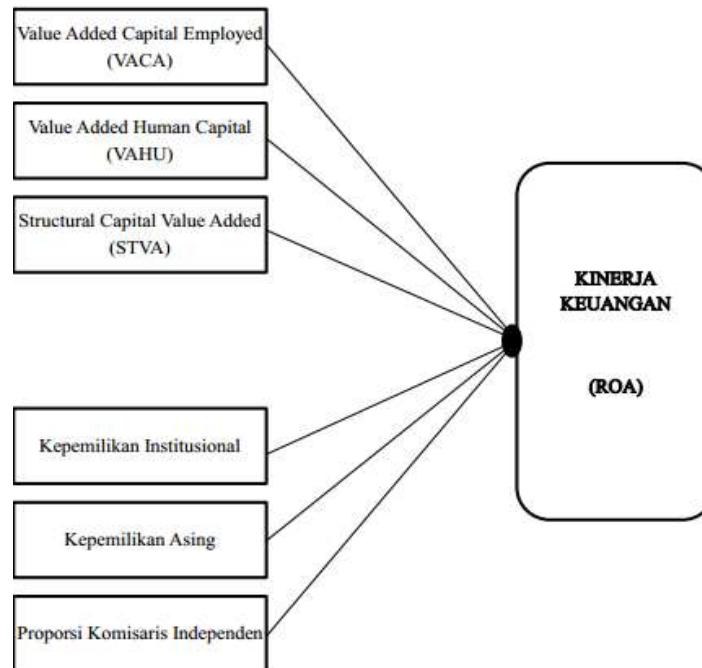
Sementara, Ahmed dan Hamdan (2015) meneliti 42 perusahaan yang *listed* di Bahrain Bourse selama periode 2007-2011, dengan judul penelitian *The impact of Corporate Governance on Firm Performance : Evidence from Bahrain Bourse*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* berelasi secara signifikan akan mempengaruhi ROE dan ROA. Akan tetapi, Pengukuran kinerja EPS tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan *corporate governance*.

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan *intellectual capital* dan *corporate governance* serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1. Kerangka Fikir

Dalam penelitian ini, variabel independen *intellectual capital* diukur dengan menggunakan model Pulic (VAIC) dengan komponennya *physical capital coefficient* (VACA), *human capital coefficient* (VAHU), dan *structural capital coefficient* (STVA). Selain *intellectual capital*, variabel independen lain yang digunakan adalah *corporate governance* yang menggunakan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan proporsi komisaris independen. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *financial performance* (PERF) dengan proksi yang digunakan adalah *Return On Assets* (ROA).



Gambar 2.2. Kerangka Fikir

2.3.2. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pengaruh *Value Added Capital Employed* (VACA) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Fajarini dan Firmansyah (2017) dalam Utami (2018:293), menjelaskan bahwa efisiensi modal fisik (*physical capital efficiency*) adalah modal keuangan (*financial capital*), yang mana semuanya adalah modal berwujud seperti kas, piutang, persediaan, tanah, mesin, peralatan, dan kendaraan. Apabila perusahaan mampu memanfaatkan *capital employed*-nya dengan baik, perusahaan tersebut akan menghasilkan laba atau *return* yang lebih besar dibandingkan perusahaan lainnya. Atau dengan kata lain, perusahaan mampu menciptakan *value added* dari efisiensi pemanfaatan *capital employed*-nya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2017), membuktikan bahwa VACA mempengaruhi nilai perusahaan secara positif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) yang menyatakan bahwa VACA memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan jika *physical capital* dikelola

secara efisien dan mampu memberikan nilai tambah untuk menunjang nilai pasarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Poh, dkk. (2018) juga menunjukkan bahwa Capital Employed Efficiency (CEE) memiliki pengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanik, Lestari dan Rosi Candra Sapitri (2016), yang justru menyatakan bahwa VACA tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian dan teori yang dipaparkan diatas, jawaban sementara penelitian ini mendukung bahwa VACA berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 :Value Added Capital Employed (VACA) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Pengaruh *Value Added Human Capital* (VAHU) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Pemanfaatan *Human Capital* secara efisien dapat ditingkatkan apabila perusahaan mampu meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keahlian karyawannya. Dengan demikian, *Human Capital* menjadi salah satu kunci penciptaan nilai serta faktor yang memberikan keunggulan kompetitif perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) menyatakan bahwa VAHU mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan dengan pegawai yang kompeten dengan rasio yang berbanding lurus dengan biaya yang terjadi mampu memberikan nilai tambah yang lebih. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sardo, dkk. (2017) menemukan bahwa *Human Capital Efficiency* (HCE) ditemukan sebagai faktor kunci dalam kesejahteraan perusahaan.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Dwi Jayanti dan Sugiharti Binastuti (2017) terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Penelitian ini menyatakan bahwa VAHU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian dan teori yang dipaparkan diatas, jawaban sementara penelitian ini mendukung bahwa VAHU berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : *Value Added Human Capital* (VAHU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3. Pengaruh *Structural Capital Value Added* (STVA) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Perusahaan yang mampu menyusun dan menatausahakan pengetahuannya, serta membangun *Structure Capital*-nya dengan baik, akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan para pesaingnya. Hal ini akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Dwi Jayanti dan Sugiharti Binastuti (2017) terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa STVA berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA).

Namun penelitian pada tahun yang sama yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk. (2017) menyatakan bahwa STVA tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut sama dengan kesimpulan yang diambil oleh Utami (2018) bahwa STVA tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *Structure Capital* perusahaan hanya sebagai formalitas yang dilakukan oleh individu-individu dalam perusahaan, sehingga hal ini tidak dapat mempengaruhi proses produksi dan inovasi produk yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian dan teori yang dipaparkan diatas, jawaban sementara penelitian ini mendukung bahwa STVA berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3 : *Structural Capital Value Added* (STVA) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

4. Pengaruh Kepemilikan Konstitusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Brickley et al., (1998) dalam Kartikawati (2009) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian dari Mollah, Farooque, dan Karim (2010) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) selaras dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Pound (1998) dalam Kartikawati (2009).

Berdasarkan penelitian di atas, jawaban sementara dari penelitian ini adalah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

5. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Tingkat kepemilikan asing yang semakin meningkat akan membuat kinerja perusahaan meningkat juga. Hal ini disebabkan karena efisiensi manajerial, keterampilan teknis, dan keadaan teknologi yang dimiliki oleh pihak asing. Umalomwa dan Olamide (2012) dalam Hermiyetti (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Dewata, dkk (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil temuan ini mendukung Mollah et al (2012) dan Rahmawati dan Handayani (2017) yang menunjukkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan penelitian dan teori yang dipaparkan diatas, jawaban sementara penelitian ini mendukung bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H5 : Kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

6. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Penelitian Beasley (1996) dalam Ningrum (2012) menguji hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan membandingkan perusahaan yang melakukan kecurangan dengan perusahaan yang

tidak melakukan kecurangan, ditemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Berkurangnya presentase kecurangan ini otomatis meningkatkan kualitas laba sedangkan banyaknya laba merupakan patokan kinerja suatu perusahaan. Dengan demikian diharapkan kinerja perusahaan akan semakin meningkat di masa depan dengan adanya komisaris independen di dalam suatu perusahaan. Barnhart & Rosenstein (1998) dalam Lastanti (2004) melakukan penelitian mengenai “*Board Composition, Managerial Ownership and Firm Performance*”, yang membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari *outsider director* (komisaris independen), maka semakin tinggi independensi dan efektivitas *corporate board* sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yermack, 1996; Daily & Dalton, 1993; Stearn & Mizruchi, 1993 dalam Wardhani (2006), juga menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan.

Berbeda dengan penelitian yang dipaparkan diatas, penelitian yang dilakukan oleh w dan Dewi (2019) yang meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017 menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian dan teori yang dipaparkan diatas, jawaban sementara penelitian ini mendukung bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H6 :Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.